Oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra

Gurubesar dan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(Makalah Muhibah MUI ke Quanzhou, Xiamen, Xi An, dan Beijing, 12 - 24 Mei 2012)

Sejak bermulanya masa reformasi Indonesia berikutan dengan mundurnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada Mei 1998, berlangsung pulalah kebebasan sosio-kultural dan keagamaan warga keturunan Tionghoa. Memang, sejak Jenderal Soeharto memegang kekuasaan seusai Peristiwa 30S/PKI warga keturunan mengalami berbagai pembatasan dan hambatan dalam banyak lapangan kehidupan—kecuali agaknya dalam bidang ekonomi berbarengan dengan pembangunan ekonomi yang digiatkan Presiden Soeharto.

Dalam masa reformasi, khususnya sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid, terkenal sebagai Gus Dur, yang sebelumnya merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), warga keturunan kembali dapat sepenuhnya mengekspresikan kekayaan sosio-kultural dan agamanya. Adalah Presiden Gus Dur yang memberikan peluang besar bagi pengakuan negara atas Konghucu sebagai agama—menjadi salah satu dari enam agama yang sejauh ini telah mendapat pengakuan negara Republik Indonesia.

Kebebasan warga keturunan itu ikut memperkuat kembali *bhinneka tunggal ika*, salah satu dari empat prinsip negara-bangsa Indonesia, selain UUD 1945, Pancasila, dan NKRI. Lihatlah contoh ini; warga keturunan
China Indonesia
, khususnya yang beragama Budha dan Konghucu
merayakan Tahun Baru Imlek 2558 yang bertepatan dengan Minggu 18 Februari 2007 M. atau 30 Muharam 1428 H. S
ementara itu s
ebagian
warga keturunan yang
memeluk
Kristen (Protestan) dan Katolik

merayakan Tahun Baru Masehi 2007, dan sebagian mereka lainnya
yang beragama Islam
juga memperingati Tahun Baru Hijriah (Sabtu 20 Januari 2007). Jadi, masyarakat
keturunan
China Indonesia
dapat hampir secara beriringan dalam waktu
memperingati tiga tahun baru sekaligus; Tahun Baru Imlek, Tahun Baru Masehi, dan Tah
u
n Baru Hijri.

Jejak Historis Hubungan Muslim Kedua Kawasan

Bagi masyarakat China, baik di *mainland* maupun di perantauan (*overseas*)—khususnya di Kawasan Nanyang (Nan-Hai), laut selatan atau Nusantara, dan lebih khusus di Indonesia, Islam sebenarnya secara historis bukanlah sesuatu
hal
baru. Di
mainland
China,
Islam bahkan
dalam ingatan bersama (
collective memory
) kaum Muslim China (Sino Muslim)
telah berkembang sejak abad pertama hijri atau abad ketujuh
masehi
, dibawa pertama kali
oleh seseorang yang disebut
Sa'ad
atau Sa'ad
ibn Lubayd, yang sering diidentikkan dengan Sa'ad ibn 'Abî Waqqâs
, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada sumber yang dapat mengkorobasi riwayat tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas ini; sementara sumber-sumber Arab menyatakan bahwa ia tidak pernah pergi ke China.
Sedangkan
identitas Sa'ad ibn Lubayd sendiri tidak
dapat
diketahui pasti
; belum terlacak dalam historiografi berbahasa Arab.

Terlepas dari kesulitan identifikasi tentang Sa'ad, kontak antara Dunia Islam--khususnya Arabia —dengan China telah berjalan cukup intens. Selama 90 tahun masa Dinasti Umaiyyah, tak kurang dari 17 Duta (*envoys*) Muslim muncul di istana China; selain membawa pesan diplomatik, mereka sekaligus adalah ‘duta perdagangan’ (*trade envoys*). Mereka diikuti sekitar 18 duta yang dikirim penguasa Dinasti Abbasiyyah dalam periode 750-798. Kunjungan-kunjungan ini mendorong perkembangan Islam di China, sehingga kaum Muslimin China dan pendatang dilaporkan sampai mampu membentuk ‘koloni’ *Ta Shih* di Kanfu (Kanton). Selain itu, terdapat pula koloni Muslim yang cukup besar sejak pertengahan abad ke-8 di Pulau Hainan dan kota Yang Chou.

Jika dilacak lebih jauh, hubungan antara Nusantara dengan *mainland* China sudah terjalin sejak masa pra-Islam, sehingga meninggalkan berbagai jejak historis penting. Sumber-sumber China bahkan memberi banyak informasi penting tentang Nusantara, termasuk pada masa awal kedatangan Islam yang ‘diwakili’ para pedagang Muslim asal Arabia di Nusantara. Riwayat perjalanan pendeta-pengembara terkenal I-Tsing yang singgah di pelabuhan Sribuza (Sriwijaya) pada 671 mencatat kehadiran orang-orang Arab dan juga Persia di sana. Pengembara Chau Ju-Kua (hidup pada abad 12) dalam catatannya berjudul *Chu-fanchi*

atau lebih dikenal sebagai buku *Ju-ku Chua* tentang perdagangan China dan Arabia yang melintasi Nusantara juga memberitakan tentang adanya "koloni Arab" di pesisir barat Sumatra, paling mungkin di Barus.

Buku *Ju-ku Chua* dan banyak sumber China ini sangat penting untuk mengungkapkan hubungan antara Muslim di kedua kawasan. T etapi salah satu masalah pokok dalam menangani sumber-sumber China adalah sulitnya mengidentifikasi nama-nama orang dan tempat yang mereka sebutkan dengan nama-nama dalam bahasa lokal sebagaimana dikenal dalam sejarah Nusantara. Dan riwayat yang mereka sampaikan juga sulit diverifikasi dengan sumber-sumber lokal, Arab, dan Persia.

Terlepas dari kesulitan itu, terkait dengan intensitas hubungan antar-Samudera antara Arabia-Nusantara dan "koloni Muslim" di China, tidak heran kalau kemudian juga ada teori tentang asal-muasal Islam di Nusantara yang "turun dari wilayah China", seperti dikemukakan Slamet Mulyana (*Runtuhnya Keradjaan Hindu-Djawa dan Timbulnja Negara-negara Islam di Nusantara* (1968; cetak ulang 2005, LKIS). Pendapat Slamet Muljana paling kontroversial yang ditolak banyak sejarawan dan ahli tentang kedatangan Islam ke Nusantara adalah bahwa Wali Songo berasal dari China. Pemerintah Orde Baru yang sangat sensitif dengan isyu ini akhirnya melarang peredaran buku tersebut.

Argumen tentang adanya ‘tetesan’ (*trickle down*) Islam dari China ke Nusantara juga dikemukakan ahli Belanda G. Th. Pigeaud dalam *Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th Centuries: The Malay Annals of Semarang and Cerbon* (ed. MC Ricklefs, 1984). Berdasarkan *Babad Semarang* dan *Babad Cirebon* , Piegaud menyatakan terdapatnya sejumlah orang China Muslim yang berasal dari China

mainland
yang aktif dalam proses Islamisasi di kawasan pantai utara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Masih tentang Islamisasi Jawa pada abad 15, Muslim China, Ma Huan dan utusan Emperor China Yongle yang mengunjungi pesisir utara Jawa pada 1416 menulis laporannya dalam *Ying-yai Shen-lan: The Overall Survey of the Indian Shores*
(1443). Dalam historiografi ini keduanya menyatakan, bahwa hanya ada tiga kelompok masyarakat Jawa pada masa itu: pertama Muslim dari wilayah Barat, kedua China (sebagiannya Muslim), dan orang Jawa yang masih belum beragama.

Mengingat teori saya saya sendiri tentang sumber dan asal Islam di Nusantara seperti berbagai "mataair dari sebuah sungai", boleh jadi juga terjadi
trickle down
Islam ke Nusantara dari beberapa koloni Muslim yang ada di China
(lihat, Azra,
The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern Ulama
, 2005)
.
Letak Nusantara yang berada di lintas samudera dan lintas benua, memungkinkan terjadinya ‘tetesan’ Islam dari utara; tetapi mataair utama Islam Nusantara bisa dipastikan adalah Arabia, tegasnya Makkah dan Madinah, Mesir, dan Iraq.

Adanya ‘tetesan’ itu lebih jauh misalnya juga terlihat dari riwayat mengenai Laksamana Cheng Ho (Zheng Ho, disebut pula sebagai Haji Sam Bo Po) yang mengadakan pelayaran pada sekitar 1405-1433. Zheng Ho yang bahkan diklaim sebagai keturunan ke-37 Nabi Muhammad SAW
meninggalkan warisan masjid, yang lebih dikenal sebagai klenteng Sam Po Kong di Semarang, Jawa Tengah.

Selain Zheng Ho masih terdapat sejumlah pengembara, pelaut, dan pemukim China Muslim--yang sayangnya riwayat mereka sangat sulit diverifikasi secara akurat. Mereka mencakup, misalnya; Haji Mah Hwang dan Haji Feh Tsin, anggota angkatan laut China yang dikatakan sering salat di masjid Semarang; Haji Boh Tak Keng asal Champa; Haji Gan Eng Cu di Tuban; Jin Bun yang dikatakan adalah Raden Patah (Demak); Tung Ka Lo, yang diklaim sebagai Sultan Trenggana; dan sebagainya.

Pada masa pra-kolonial, orang-orang atau komunitas China beserta unsur budayanya lambat laun melebur dengan budaya lokal. Sampai abad ke-15, seperti disimpulkan Denys Lombard dalam *Nusa Jawa* (1996), kebanyakan orang asal China yang menetap di pesisir pulau-pulau Nusantara menganut Islam. Bahkan istilah "*babah*"--yang sampai sekarang masih digunakan untuk menyebut laki-laki China— adalah gelar kehormatan yang sangat dikenal di Dunia Muslim, khususnya di Turki untuk menyebut seorang tokoh terkemuka atau seorang syeikh penyebar Islam.

Lebih jauh lagi, hubungan dan koneksi di antara masyarakat Muslim Nusantara dan Muslim China juga terjalin melalui jaringan ulama sepanjang abad 17-18 (Azra 2005). Mata rantai utama jaringan tersebut terbentuk antara lain melalui Ma Ming Xing, seorang ulama dan *mursyid* Tarekat Naqsyabandiyah pada abad 18, yang seperguruan dengan ulama besar Indonesia Syekh Abd al-Samad al-Palimbani dan Muhammad Arsyad al-Banjari. Mereka belajar dari guru-guru yang sama di Yaman, dan kemudian juga di Makkah dan Madinah.

"*Economic-Cultural Gap*" dan Langkah Ke Depan

Integrasi orang dan komunitas China perantauan ke dalam masyarakat Muslim Nusantara mulai terganggu dengan kedatangan kolonialisme Belanda, yang kemudian menjadikan orang-orang China sebagai pialang (*middlemen* atau *brokers*) dalam perdagangan mereka dengan masyarakat pribumi. Disrupsi dan kehancuran ekonomi masyarakat Muslim pribumi akibat praktik monopoli pasca Belanda yang dibantu pialang China dalam perjalanan waktu

menumbuhkan sikap antipati dari kalangan pribumi terhadap masyarakat China keturunan.

Terputusnya hubungan antara Nusantara dengan China *mainland* sejak 1740-an sempat menimbulkan kebingun
g
an di kalangan China Muslim keturunan, sehingga muncullah kembali kecenderungan mereka untuk menganut Islam dalam rangka asimilasi
atau pembauran
dengan masyarakat pribumi. Komunitas Muslim keturunan kembali membangun masjid mereka sendiri, dan mengubur anggota komunitas mereka yang meninggal pada kuburan Muslim.
P
ada saat yang sama juga terjadi asimilasi kultural;
orang-orang dan
keluarga terkemuka China menerima dan mengadopsi aspek tertentu budaya Jawa
, Sunda, Minang, dan seterusnya
.

Asimilasi dan upaya dakwah Islam terhadap warga keturunan kembali terganggu dengan terjadinya radikalisasi masyarakat Muslim pribumi dalam melawan Belanda. Dan di sini, warga keturunan kadang-kadang menjadi
terkait dalam
konflik dan perang, seperti terlihat dalam Perang Jawa, pimpinan Pangeran Diponegoro
(1825-1830)
. Menurut sejarah resmi Indonesia, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya
marah karena
adanya warga keturunan
China
yang
diberikan
hak istimewa
untuk memungut pajak dan biaya
toll
jalan
di sekitar kediaman Diponegoro
. Konflik yang sering berujung dengan kerusuhan anti-China
juga terjadi dalam waktu-waktu tertentu sepanjang
masa kolonialis
me
Belanda, khususnya lagi ketika nasionalisme Indonesia, seperti diwakili Sarekat Islam (SI) mengalami kebangkitan pada awal abad ke-20.

Alineasi warga keturunan dari masyarakat pribumi mencapai puncaknya pada 1854 dengan penetapan status warga Belanda (dan Eropa lainnya) pada puncak stratifikasi sosial masyarakat kolonial. Selanjutnya, warga keturunan (China)
ditempatkan pada stratifikasi sosial kedua
bersama
bangsa-bangsa
Timur Asi
a
(India dan Arab). Sedangkan masyarakat pribumi ditempatkan sebagai kelas tiga
—stratifikasi sosial terbawah
.
Stratifikasi sosial dan p
enggolongan warga Netherlands East-Indies berdasarkan kategori etnis ini
kian
memperkuat
cultural gap
di antara warga keturunan dengan masyarakat pribumi. Dan sebaliknya asosiasi kultural dan keagamaan dengan Belanda--dan sekaligus Kristiani
tas (Kristen Protestan dan Katolik
--semakin meningkat di kalangan masyarakat keturunan. Dalam semua proses ini terjadilah pembentukan prasangka timbal balik di antara warga keturunan dengan masyarakat Muslim pribumi.
P
rasangka dan bias kultural itu juga mencakup agama yang dipeluk masing-masing komunitas tersebut.

Perkembangan sosio-kultural dan politik pasca G30S/PKI semakin kurang menguntungkan hubungan antara masyarakat pribumi Muslim dengan warga keturunan. Ketakutan warga China keturunan terhadap "pembersihan" yang dilakukan masyarakat Muslim pribumi terhadap
orang eks
komunis
membuat
gap
di antara warga keturunan dengan masyarakat pribumi semakin lebar. Sama seperti banyak orang komunis lain yang secara massal masuk Krist
ianitas
karena takut dituduh "at
h
eis"
,
terjadi
lah
gelombang besar warga keturunan masuk agama Kristiani
tas

.
Perkembangan ini kian kurang menguntungkan
dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengharamkan setiap
dan seluruh
ekspresi sosio-kultural warga keturunan.

Meski demikian, upaya mengembangkan akulturasi dan asimilasi, khususnya melalui Islam bukan tidak ada. Dalam hal ini penting dicatat usaha yang dilakukan Haji Abdul Karim Oei Tjeng Hien (6 Juni 1905-14 Oktober 1988), tokoh Muhammadiyah, yang kemudian bersama Abdusshomad Yap Asiong (pimpinan PIT/Persatuan Islam Tionghoa) dan Kho Goan Tjin (pimpinan Persatuan Muslim Tionghoa/PMT) mendirikan organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pada 14 April 1961. Pada masa rejim Orde Baru, kepanjangan PITI diubah menjadi Persatuan Iman Tauhid Islam; tetapi pada Mei 2000, kepanjangan PITI dikembalikan kepada aslinya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Perlu disinggung, sangat aktif dalam upaya pembauran, Abdul Karim Oei juga menjadi anggota Bakom PKAB dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Meski ada PITI, *economic and* s*ocio-cultural gaps* antara warga keturunan dengan masyarakat Muslim pribumi sebagian besar tetap bertahan terutama terkait dengan adanya
disparitas ekonomi yang semakin tajam pada masa Orde Baru antara warga keturunan dengan masyarakat lainnya. Tetapi, para pengusaha keturunan berkolaborasi dengan
penguasa
Orde Baru
yang
beragama Islam dalam berbagai sektor ekonomi
.

Karena pemerintah Presiden Soeharto mengharamkan setiap pembicaraan tentang hubungan antara warga keturunan dengan masyarakat pribumi dengan alasan termasuk masalah SARA, terjadilah pengendapan *social resentment* dengan potensi konflik dan kekerasan cukup besar terhadap warga keturunan. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya ledakan
kekerasan (
violence outburst
)
dari waktu ke waktu dari masyarakat pribumi terhadap warga keturunan; puncaknya adalah kerusuhan anti
warga keturunan
China dalam skala besar

pada hari-hari seputar
jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya pada Mei 1998.

Kini, di masa pasca Soeharto ketika masyarakat keturunan China bebas mengekspresikan kekayaan sosio-kultural dan keagamaannya
, hubungan antara warga keturunan dengan masyarakat Muslim pribumi
relatif
tidak terganggu lagi.
Adopsi demokrasi sejak 1999 membuka peluang besar bagi munculnya kembali politisi keturunan dalam kancah politik dan pemerintahan pusat dan daerah.

Perkembangan seperti ini cukup menjanjikan bagi hubungan lebih harmonis di antara warga keturunan dengan komunitas lainnya di Indonesia; dapat semakin kuat di masa kini dan mendatang. Warga keturunan
bersama banyak
komunitas lain
kian dapat
menghilangkan—atau setidaknya meminimalisasi—prasangka sosial-kultural
dan keagamaan timbal balik
yang tidak menguntungkan. Sebab itu,
seluruh komunitas bangsa
mesti
terus
meningkatkan dan memperluas
kerjasama, program dan
kegiatan
berkaitan dengan upaya mempererat tali solidaritas
kebangsaan
dengan menggunakan berbagai sarana yang tersedia. ***